

PENGARUH EFEKTIVITAS PEMANFAATAN ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS PUBLIK DI SEKTOR TRANSPORTASI DKI JAKARTA TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT UMUM

Risa Dwi Oktaviyani¹, Laila Awalia Ramadani², Dinda Aulia Julianti³, Aldilah Rhamadani⁴,
Dhita Amalia⁵

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Sarana Informatika
63230778@bsi.ac.id, 63230944@bsi.ac.id, 63231042@bsi.ac.id, 63231374@bsi.ac.id,
63231395@bsi.ac.id

Abstract

This study was conducted to determine the effect of budget utilization effectiveness and public accountability on public satisfaction with the transportation sector in DKI Jakarta. The study employed a quantitative approach using a survey of 100 respondents who are users of TransJakarta, Jakarta MRT, and Jakarta LRT services Jakarta. Data collection was conducted through the distribution of questionnaires, while data analysis utilized multiple linear regression. The results of the study indicate that the effectiveness of budget utilization has a positive and significant effect on public satisfaction. Public accountability was also found to have a positive and significant effect on the level of satisfaction among users of transportation services. Together, these two variables have a significant effect on public satisfaction. The coefficient of determination indicates that the effectiveness of budget utilization and public accountability can explain 20.5% of the variation in public satisfaction, while the remainder is influenced by other factors not discussed in this study. These findings indicate that effective budget management, coupled with the implementation of good accountability practices, can support improvements in the quality of public transportation services and enhance public satisfaction in DKI Jakarta.

Keywords: *Budget utilization effectiveness, public accountability, public satisfaction, public transportation, DKI Jakarta.*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh efektivitas pemanfaatan anggaran dan akuntabilitas publik terhadap kepuasan masyarakat pada sektor transportasi di DKI Jakarta. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 100 responden yang merupakan pengguna layanan TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, sedangkan pengolahan data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Akuntabilitas publik juga terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan pengguna layanan transportasi. Secara bersama-sama, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa efektivitas pemanfaatan anggaran dan akuntabilitas publik mampu menjelaskan sebesar 20,5% variasi kepuasan masyarakat, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang efektif disertai penerapan akuntabilitas yang

Article history

Received: Juni 2026

Reviewed: Juni 2026

Published: Juni 2026

Plagiarism checker no 80

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

baik dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan transportasi publik serta memperkuat kepuasan masyarakat di DKI Jakarta.		
--	--	--

Kata Kunci: <i>Efektivitas pemanfaatan anggaran, akuntabilitas publik, kepuasan masyarakat, transportasi publik, DKI Jakarta.</i>		
--	--	--

1. Pendahuluan

Sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik, transportasi umum berperan mendukung mobilitas masyarakat sekaligus roda perekonomian. Posisi DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas ekonomi nasional membuat tingkat mobilitasnya sangat tinggi, sehingga dibutuhkan sistem transportasi yang efektif, efisien, aman, dan berkelanjutan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya mengembangkan sektor ini melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas pendukung, pengembangan moda angkutan massal, serta integrasi antarlayanan transportasi.

Beberapa tahun belakangan, sektor transportasi mendapatkan dukungan pendanaan yang cukup besar untuk mengembangkan berbagai layanan publik seperti TransJakarta, Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Rel Terpadu (LRT), dan berbagai program integrasi transportasi lainnya. Besarnya alokasi ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan mutu layanan transportasi. Namun, keberhasilan sebuah program tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya dana yang tersedia, melainkan juga oleh sejauh mana pemerintah mampu mengelola dan memanfaatkan anggaran tersebut secara optimal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Efektivitas pemanfaatan anggaran dapat dimaknai sebagai kemampuan sebuah organisasi mengelola sumber daya keuangannya secara tepat, sehingga keluaran (output) dan hasil (outcome) yang dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pengelolaan anggaran yang efektif berpeluang meningkatkan mutu pelayanan, memperluas akses transportasi publik, dan memberikan manfaat yang langsung dirasakan masyarakat. Sebaliknya, pemanfaatan anggaran yang kurang optimal bisa menghambat pencapaian tujuan program sekalipun dana yang tersedia cukup besar.

Selain efektivitas anggaran, akuntabilitas publik juga menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Akuntabilitas publik mencerminkan tanggung jawab pemerintah dalam menjelaskan dan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, serta hasil yang dicapai. Penerapan prinsip akuntabilitas yang baik dapat mendorong transparansi, memperkuat kepercayaan publik, dan menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pada sektor transportasi, akuntabilitas dapat terwujud melalui keterbukaan informasi penggunaan anggaran, penyampaian laporan kinerja secara berkala, serta respons yang cepat terhadap aspirasi dan keluhan masyarakat.

Pada akhirnya, keberhasilan pengelolaan layanan transportasi tercermin dari tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna. Kepuasan masyarakat menjadi tolok ukur penting untuk menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Tingkat kepuasan yang tinggi menandakan bahwa layanan yang diterima sudah sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna, baik dari sisi kenyamanan, keamanan, keandalan operasional, maupun kemudahan akses.

Kendati berbagai program pengembangan transportasi publik telah direalisasikan di DKI Jakarta, sejumlah persoalan masih kerap muncul, seperti tingginya kepadatan penumpang pada jam-jam tertentu, keterbatasan jangkauan layanan di beberapa wilayah, dan mutu pelayanan yang belum sepenuhnya merata. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas transportasi publik tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga

pada seberapa efektif anggaran tersebut dimanfaatkan serta seberapa tinggi tingkat akuntabilitas dalam pelaksanaannya.

Berangkat dari kondisi tersebut, efektivitas pemanfaatan anggaran dan akuntabilitas publik diduga berkaitan dengan tingkat kepuasan masyarakat pengguna transportasi publik di DKI Jakarta. Semakin optimal pengelolaan anggaran dan semakin tinggi akuntabilitas yang diterapkan, semakin besar pula kemungkinan terciptanya layanan transportasi berkualitas yang memenuhi harapan masyarakat. Atas dasar itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pengaruh efektivitas pemanfaatan anggaran dan akuntabilitas publik terhadap kepuasan masyarakat pada sektor transportasi di DKI Jakarta.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Transparansi Anggaran

2.1.1 Pengertian

Transparansi anggaran dapat dipahami sebagai komitmen pemerintah untuk membuka informasi mengenai pengelolaan anggaran kepada masyarakat secara jelas, lengkap, dan mudah diakses. Informasi tersebut meliputi proses penyusunan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga penyampaian laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik. Melalui penerapan transparansi, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui, mengawasi, dan menilai apakah anggaran negara atau daerah telah dikelola sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung terwujudnya *good governance*.

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa transparansi merupakan bentuk keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut. Prinsip ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel karena memungkinkan masyarakat menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan publik.

Sementara itu, Krina (2003) menyatakan bahwa transparansi merupakan prinsip yang memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Informasi yang dimaksud meliputi kebijakan yang ditetapkan, proses pengambilan keputusan, serta hasil pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, transparansi anggaran tidak hanya diwujudkan melalui publikasi dokumen keuangan, tetapi juga melalui penyediaan informasi yang mudah diakses, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai dasar dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran publik.

Dalam pengelolaan sektor transportasi di DKI Jakarta, transparansi anggaran memiliki peran penting untuk memastikan masyarakat mengetahui proses alokasi dan penggunaan dana publik yang ditujukan bagi pembangunan maupun peningkatan kualitas layanan transportasi. Tingkat transparansi yang semakin baik berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan transportasi yang diterima.

2.1.2 Indikator Transparansi Anggaran Transportasi

Transparansi anggaran pada sektor transportasi dapat dinilai melalui sejumlah indikator yang menggambarkan tingkat keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi pengelolaan anggaran kepada masyarakat. Menurut Ritonga dan Syahrir (2016), transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dievaluasi berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu tahap perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta pelaporan dan pertanggungjawaban

anggaran. Ketiga dimensi tersebut mencerminkan sejauh mana pemerintah menerapkan prinsip keterbukaan dalam pengelolaan dana publik.

Mengacu pada berbagai penelitian mengenai transparansi pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi anggaran dalam penelitian ini, yaitu:

3. Ketersediaan Informasi Anggaran

Pemerintah menyediakan informasi terkait alokasi maupun penggunaan anggaran sektor transportasi secara terbuka, lengkap, dan dapat diketahui oleh masyarakat.

4. Kemudahan Akses Informasi

Informasi mengenai anggaran transportasi dapat diperoleh masyarakat dengan mudah melalui berbagai media, seperti situs resmi pemerintah, laporan publik, maupun sarana informasi lainnya.

5. Ketepatan Waktu Penyampaian Informasi

Informasi yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi anggaran disampaikan sesuai jadwal serta ketentuan yang telah ditetapkan.

6. Kelengkapan dan Kejelasan Informasi

Informasi anggaran yang dipublikasikan memuat rincian yang memadai dan disajikan secara jelas sehingga dapat dipahami oleh masyarakat.

7. Publikasi Laporan Pertanggungjawaban

Pemerintah menyampaikan laporan realisasi serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran transportasi secara terbuka kepada publik.

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, pengukuran transparansi anggaran transportasi dalam penelitian ini dilakukan melalui aspek keterbukaan informasi, kemudahan akses terhadap informasi, ketepatan waktu penyampaian informasi, kelengkapan dan kejelasan informasi yang tersedia, serta publikasi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

2.1.3 Dasar Hukum Keterbukaan Transparansi Anggaran untuk Publik

Keterbukaan anggaran merupakan salah satu elemen fundamental dalam penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Melalui transparansi anggaran, masyarakat diberikan hak untuk mengetahui berbagai informasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara maupun daerah sehingga dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana publik. Di Indonesia, pelaksanaan transparansi anggaran telah memperoleh landasan hukum yang kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban pemerintah dalam menyediakan informasi kepada masyarakat.

Beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum keterbukaan informasi anggaran kepada publik antara lain sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)**

Undang-undang ini memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh akses terhadap informasi publik, termasuk informasi yang berkaitan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran pemerintah. Selain itu, badan publik diwajibkan menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat.

2. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**

Peraturan ini menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan berdasarkan prinsip tertib, taat terhadap peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah serta menyediakan akses informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan ini mengatur bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Instruksi ini mengarahkan setiap instansi pemerintah untuk menerapkan sistem pertanggungjawaban yang terbuka dan jelas atas penggunaan sumber daya serta pelaksanaan program pemerintah.

Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut, transparansi anggaran bukan hanya menjadi prinsip tata kelola pemerintahan, tetapi juga merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam sektor transportasi DKI Jakarta, keterbukaan informasi mengenai proses perencanaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban anggaran berperan penting dalam memperkuat pengawasan publik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan transportasi yang diselenggarakan pemerintah.

2.1.4 Bentuk Transparansi Anggaran

Transparansi anggaran merupakan implementasi prinsip keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi terkait pengelolaan keuangan publik kepada masyarakat. Penerapan transparansi bertujuan agar masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui, memantau, dan mengevaluasi penggunaan anggaran yang telah dialokasikan guna mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, transparansi berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Menurut Salle (2016), transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu kebijakan publik yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan informasi (asimetri informasi) antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk menyediakan akses informasi yang memadai mengenai pengelolaan anggaran sehingga masyarakat dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal.

Berdasarkan berbagai kajian mengenai transparansi pengelolaan anggaran daerah, implementasi transparansi anggaran dapat diwujudkan melalui beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Keterbukaan Dokumen Anggaran

Pemerintah menyediakan dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi anggaran sehingga dapat diakses oleh masyarakat.

2. Publikasi Informasi Keuangan kepada Masyarakat

Informasi mengenai penggunaan anggaran disampaikan secara berkala melalui berbagai media yang mudah dijangkau oleh publik.

3. Pemanfaatan Media Digital dan Website Resmi

Penyediaan informasi anggaran melalui platform digital dan situs resmi pemerintah memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi secara cepat dan efisien.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Publik

Pemerintah menyampaikan laporan realisasi anggaran dan hasil pelaksanaan program sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

5. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Anggaran

Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan masukan, kritik, maupun melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dana publik.

Dalam sektor transportasi DKI Jakarta, transparansi anggaran dapat diwujudkan melalui penyebaran informasi mengenai anggaran pembangunan transportasi, publikasi laporan realisasi penggunaan anggaran, serta penyediaan akses informasi keuangan melalui portal resmi pemerintah daerah. Dengan adanya keterbukaan tersebut, masyarakat dapat menilai dan mengawasi penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan transportasi publik.

2.1.5 Keterbukaan informasi anggaran transportasi.

Keterbukaan informasi anggaran transportasi merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menyediakan informasi yang jelas, lengkap, dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pada sektor transportasi. Penyediaan informasi tersebut menjadi bagian penting dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik karena memungkinkan masyarakat memahami bagaimana dana publik dialokasikan dan dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan transportasi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan dan menyampaikan informasi publik yang berada dalam kewenangannya kepada masyarakat, kecuali informasi yang secara khusus dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pengelolaan anggaran transportasi, implementasi keterbukaan informasi dapat dilakukan melalui publikasi dokumen perencanaan anggaran, laporan realisasi anggaran, serta informasi mengenai berbagai program dan kegiatan transportasi yang didanai oleh pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2018), keterbukaan informasi merupakan salah satu bentuk transparansi yang diwujudkan melalui pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sumber daya publik. Ketersediaan informasi yang terbuka dan mudah diakses memungkinkan masyarakat melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran sekaligus menilai kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik.

Pada sektor transportasi DKI Jakarta, keterbukaan informasi anggaran dapat tercermin dari penyediaan informasi mengenai pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi, subsidi layanan transportasi umum, pengadaan fasilitas dan sarana transportasi, serta laporan realisasi penggunaan anggaran yang dipublikasikan melalui berbagai media resmi pemerintah. Semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi yang diberikan, maka semakin besar peluang untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mendorong terciptanya kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi publik yang tersedia.

2.1.6 Akses masyarakat terhadap informasi penggunaan anggaran.

Akses masyarakat terhadap informasi penggunaan anggaran merupakan hak publik untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, dan

pertanggungjawaban anggaran yang dikelola oleh pemerintah. Ketersediaan akses informasi tersebut menjadi salah satu komponen penting dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas keuangan publik karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dana publik. Semakin mudah informasi anggaran diperoleh oleh masyarakat, semakin besar pula peluang terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Menurut Ema Wulandari dan I Gede Artha (2016), keterbukaan informasi keuangan daerah dapat diwujudkan melalui penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), yang memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah secara lebih terbuka. Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan, baik dari sisi keberhasilan maupun kendala yang dihadapi, sehingga fungsi kontrol sosial dapat berjalan secara lebih optimal.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Sebagai badan publik, pemerintah berkewajiban menyediakan informasi mengenai penggunaan anggaran secara transparan serta memastikan informasi tersebut mudah diakses oleh masyarakat.

Dalam sektor transportasi DKI Jakarta, akses terhadap informasi penggunaan anggaran dapat diwujudkan melalui penyediaan dokumen anggaran, laporan realisasi anggaran, informasi mengenai proyek pembangunan transportasi, subsidi transportasi umum, serta pengadaan sarana dan prasarana transportasi yang dipublikasikan melalui situs resmi pemerintah daerah maupun media informasi lainnya. Ketersediaan akses informasi yang memadai memungkinkan masyarakat mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana anggaran transportasi dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik.

2.2 Akuntabilitas Anggaran

2.2.1 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan sektor publik. Prinsip ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap penggunaan sumber daya publik serta pelaksanaan program yang dilakukan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang hak atas informasi dan penerima manfaat pelayanan publik. Penerapan akuntabilitas menuntut pemerintah untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara terbuka, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Mahmudi (2016), akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang menerima amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan laporan, mengungkapkan informasi, dan melaporkan seluruh aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Definisi ini menegaskan adanya hubungan pertanggungjawaban antara pihak yang mengelola sumber daya dengan pihak yang memberikan kepercayaan.

Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya publik serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepadanya kepada masyarakat. Dalam praktik pemerintahan, akuntabilitas memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) karena dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Auditya, Husaini, dan Lismawati (2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah dalam

mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah melalui penyajian laporan dan penyampaian informasi kepada masyarakat sebagai bentuk penerapan prinsip good governance. Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencakup kewajiban pemerintah dalam menjelaskan pelaksanaan program dan hasil penggunaan anggaran kepada publik.

Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah atau organisasi sektor publik untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya, pelaksanaan kegiatan, serta pencapaian hasil kepada masyarakat secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini, akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan penggunaan anggaran sektor transportasi kepada masyarakat sebagai pengguna layanan transportasi publik.

2.2.2 Bentuk Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan, program, dan penggunaan anggaran kepada pihak yang berkepentingan, khususnya masyarakat. Penerapan akuntabilitas memiliki peran penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik karena memastikan bahwa sumber daya publik dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum, akuntabilitas publik dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal.

Akuntabilitas Vertikal merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu organisasi atau unit kerja kepada pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi dalam struktur organisasi. Dalam lingkungan pemerintahan, akuntabilitas vertikal diwujudkan melalui penyampaian laporan pelaksanaan program, laporan kinerja, serta laporan penggunaan anggaran kepada atasan atau lembaga pengawas yang berwenang melakukan evaluasi dan pengendalian.

Akuntabilitas Horizontal adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat maupun lembaga lain yang tidak berada dalam hubungan hierarkis atau hubungan atasan dan bawahan. Implementasi akuntabilitas horizontal dilakukan melalui penyediaan informasi publik, publikasi laporan keuangan dan laporan kinerja, serta pemberian akses kepada masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat menilai sejauh mana kebijakan dan penggunaan anggaran telah memberikan manfaat yang sesuai dengan kepentingan publik.

Pada sektor transportasi DKI Jakarta, akuntabilitas vertikal dapat tercermin dari kewajiban Dinas Perhubungan dalam menyampaikan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pelaksanaan program serta penggunaan anggaran transportasi. Sementara itu, akuntabilitas horizontal diwujudkan melalui publikasi laporan kinerja dan laporan penggunaan anggaran kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban publik. Dengan adanya kedua bentuk akuntabilitas tersebut, masyarakat dapat mengevaluasi efektivitas penggunaan anggaran transportasi dalam mendukung peningkatan kualitas layanan transportasi publik.

2.2.3 Indikator Akuntabilitas Anggaran Transportasi

Akuntabilitas anggaran transportasi merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan serta penyelenggaraan layanan transportasi kepada masyarakat. Penerapan akuntabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang

digunakan telah sesuai dengan tujuan yang direncanakan, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Melalui pelaksanaan akuntabilitas yang baik, kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan sektor transportasi dapat semakin meningkat.

Menurut Nurrizkiana, Handayani, dan Widiastuty (2017), akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat tercermin dari kemampuan pemerintah dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, menyajikan laporan keuangan yang dapat dipercaya, serta menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Penerapan akuntabilitas yang efektif akan mendukung terwujudnya transparansi sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Selain itu, konsep akuntabilitas publik menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas dapat dinilai melalui beberapa aspek, seperti pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, keterbukaan informasi kepada masyarakat, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta evaluasi terhadap hasil yang dicapai dari penggunaan anggaran.

Berdasarkan uraian tersebut, indikator akuntabilitas anggaran transportasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Kesesuaian penggunaan anggaran dengan program yang telah direncanakan.
2. Kejelasan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran sektor transportasi.
3. Penyampaian laporan penggunaan anggaran secara berkala kepada pihak yang berkepentingan.
4. Kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan anggaran.
5. Pelaksanaan evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran transportasi.

Indikator-indikator tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran sektor transportasi kepada masyarakat sebagai pengguna layanan transportasi publik.

2.2.4 Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

Pertanggungjawaban penggunaan anggaran merupakan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan laporan dan penjelasan mengenai pemanfaatan dana publik yang telah dialokasikan dalam berbagai program dan kegiatan kepada pihak yang berkepentingan, khususnya masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendukung pencapaian tujuan program. Dalam sektor publik, pertanggungjawaban penggunaan anggaran menjadi salah satu bentuk implementasi akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat sebagai pemilik kepentingan atas penggunaan dana publik.

Menurut Nurrizkiana, Handayani, dan Widiastuty (2017), pertanggungjawaban penggunaan anggaran merupakan bagian integral dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang diwujudkan melalui penyusunan dan penyampaian laporan keuangan yang transparan, andal, serta mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. Laporan tersebut berfungsi sebagai media untuk menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan telah dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, pertanggungjawaban penggunaan anggaran mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan program yang dibiayai oleh anggaran publik. Melalui mekanisme pertanggungjawaban yang baik,

masyarakat dapat menilai tingkat keberhasilan program sekaligus mengevaluasi manfaat yang dihasilkan bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam sektor transportasi DKI Jakarta, pertanggungjawaban penggunaan anggaran dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan realisasi anggaran, laporan kinerja program transportasi, serta publikasi informasi mengenai hasil pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan transportasi yang dibiayai oleh anggaran daerah. Dengan adanya pertanggungjawaban yang jelas dan terbuka, masyarakat dapat menilai apakah anggaran transportasi telah dimanfaatkan secara tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat sesuai dengan kebutuhan publik.

2.2.5 Pelaporan dan Evaluasi Program Transportasi

Pelaporan dan evaluasi program transportasi merupakan komponen penting dalam penerapan akuntabilitas publik yang berfungsi untuk menilai capaian program serta efektivitas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Melalui kegiatan pelaporan, pemerintah menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan program, pencapaian kinerja, dan realisasi penggunaan anggaran kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Sementara itu, evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan program sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul selama proses pelaksanaan.

Menurut Auditya, Husaini, dan Lismawati (2021), pelaporan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan program yang telah dijalankan. Penyusunan laporan yang lengkap, tepat, dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Selain berfungsi sebagai media pertanggungjawaban, laporan juga menjadi sumber informasi penting dalam proses evaluasi untuk menilai kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Evaluasi program memiliki peran strategis dalam menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan, mengukur efisiensi penggunaan anggaran, serta menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pada periode berikutnya. Melalui evaluasi yang berkelanjutan, pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan program dan melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan.

Dalam sektor transportasi DKI Jakarta, pelaporan dan evaluasi program dapat diwujudkan melalui penyampaian laporan realisasi anggaran, laporan kinerja pelayanan transportasi, serta evaluasi terhadap pencapaian berbagai target program, seperti peningkatan aksesibilitas, kenyamanan, keamanan, dan ketepatan waktu layanan transportasi. Hasil evaluasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi sekaligus memastikan bahwa penggunaan anggaran telah memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

2.3 Kepuasan Masyarakat

2.3.1 Pengertian Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan pelayanan yang diberikan oleh suatu instansi kepada masyarakat. Kepuasan tersebut muncul ketika pelayanan yang diterima mampu memenuhi kebutuhan, harapan, dan keinginan masyarakat sebagai pengguna layanan. Oleh karena itu, semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan, semakin besar pula kemungkinan terciptanya tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi.

Degodona, Gulo, dan Simanjorang (2023) menjelaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan bentuk evaluasi atau penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diterimanya. Tingkat kepuasan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kecepatan pelayanan, kemampuan petugas dalam memberikan layanan, kejelasan informasi yang disampaikan, kenyamanan lingkungan pelayanan, serta kemudahan akses terhadap layanan yang tersedia. Apabila pelayanan yang diberikan sesuai atau bahkan melebihi harapan masyarakat, maka masyarakat akan memberikan penilaian yang positif terhadap pelayanan tersebut.

Dalam penelitian ini, kepuasan masyarakat dimaknai sebagai tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan transportasi publik yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tingkat kepuasan tersebut dipengaruhi oleh efektivitas penggunaan anggaran dan penerapan akuntabilitas publik dalam pengelolaan sektor transportasi. Kepuasan masyarakat diukur melalui persepsi pengguna terhadap kualitas layanan transportasi, kemudahan akses, tingkat kenyamanan dan keamanan perjalanan, serta manfaat yang dirasakan dari berbagai program transportasi yang telah dilaksanakan pemerintah.

2.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan Masyarakat

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan mutu pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah. Kepuasan masyarakat akan terbentuk apabila pelayanan yang diterima mampu memenuhi kebutuhan, harapan, dan manfaat yang diinginkan oleh pengguna layanan. Sebaliknya, apabila kualitas pelayanan tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat, maka tingkat kepuasan yang dirasakan akan mengalami penurunan.

Menurut Degodona, Gulo, dan Simanjorang (2023), terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, yaitu:

1. **Kualitas Pelayanan**
Pelayanan yang diberikan secara cepat, tepat, ramah, dan berkualitas dapat meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap layanan yang diterima.
2. **Kejelasan Informasi**
Informasi yang disampaikan secara lengkap, jelas, dan mudah dipahami akan membantu masyarakat dalam memperoleh pelayanan sehingga dapat meningkatkan tingkat kepuasan.
3. **Kemudahan Akses Pelayanan**
Kemudahan dalam mengakses pelayanan, baik dari aspek lokasi, prosedur, maupun fasilitas pendukung, menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat.
4. **Kompetensi dan Profesionalisme Petugas**
Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan secara profesional, responsif, dan solutif akan menciptakan pengalaman pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
5. **Kenyamanan dan Keamanan Pelayanan**
Kondisi lingkungan pelayanan yang aman, nyaman, dan tertata dengan baik dapat memberikan nilai tambah yang berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat.

Dalam sektor transportasi DKI Jakarta, faktor-faktor tersebut dapat tercermin melalui kualitas layanan transportasi yang tersedia, kemudahan akses terhadap moda transportasi publik, kejelasan informasi perjalanan, tingkat keamanan dan kenyamanan selama menggunakan layanan, serta kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan transportasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Semakin baik kualitas faktor-faktor tersebut,

semakin tinggi pula tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi publik yang diberikan.

2.3.3 Indikator Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat diukur melalui berbagai indikator yang mencerminkan penilaian masyarakat terhadap mutu pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Pengukuran tersebut berfungsi untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik telah memenuhi harapan masyarakat sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam penyempurnaan kualitas pelayanan pada periode berikutnya. Hasil pengukuran kepuasan juga dapat digunakan sebagai dasar bagi instansi pemerintah dalam merumuskan strategi peningkatan kinerja pelayanan secara berkelanjutan.

Mengacu pada pedoman **Survei Kepuasan Masyarakat** yang diterbitkan oleh **Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB)**, tingkat kepuasan masyarakat diukur melalui beberapa indikator sebagai berikut.

1. Persyaratan Pelayanan

Menggambarkan tingkat kemudahan masyarakat dalam memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan untuk memperoleh suatu pelayanan.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Menunjukkan kemudahan alur pelayanan serta prosedur yang diterapkan oleh penyelenggara layanan kepada masyarakat.

3. Waktu Penyelesaian

Mengukur kesesuaian waktu penyelesaian pelayanan dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.

4. Biaya atau Tarif

Menilai kesesuaian biaya pelayanan yang dibebankan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Mengukur kesesuaian hasil pelayanan yang diterima masyarakat dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara.

6. Kompetensi Pelaksana

Menilai kemampuan, pengetahuan, serta keterampilan petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

7. Perilaku Pelaksana

Menggambarkan sikap petugas dalam memberikan pelayanan, yang meliputi kesopanan, keramahan, tanggung jawab, serta profesionalisme.

8. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Menunjukkan kemampuan instansi dalam menerima, mengelola, dan menindaklanjuti berbagai keluhan maupun saran yang disampaikan masyarakat.

9. Sarana dan Prasarana

Menilai kecukupan fasilitas dan infrastruktur pendukung yang tersedia untuk menunjang kelancaran proses pelayanan.

Dalam penelitian ini, seluruh indikator tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan transportasi publik di DKI Jakarta. Semakin

baik penilaian masyarakat terhadap setiap indikator pelayanan, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

3. Metodologi Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei agar data yang diperoleh dapat diukur dan dianalisis secara statistik. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian, yakni mengukur besarnya pengaruh efektivitas pemanfaatan anggaran dan akuntabilitas publik (sebagai variabel independen) terhadap kepuasan masyarakat pengguna transportasi umum di DKI Jakarta (sebagai variabel dependen). Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian, kemudian diolah menggunakan teknik analisis statistik sehingga hasilnya dapat menggambarkan hubungan antarvariabel secara objektif berdasarkan data empiris.

3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Objek penelitian terdiri dari:

1. Efektivitas Pemanfaatan Anggaran (X1)
2. Akuntabilitas Publik (X2)
3. Kepuasan Masyarakat (Y)

3.2.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, yakni masyarakat yang menggunakan layanan transportasi umum di DKI Jakarta, mencakup TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Responden dipilih berdasarkan keterlibatan mereka sebagai pengguna yang berinteraksi langsung dengan layanan tersebut. Pengalaman responden dalam menggunakan transportasi umum menjadi dasar penilaian terhadap efektivitas pemanfaatan anggaran dan akuntabilitas publik yang diterapkan pemerintah, sehingga dapat menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat atas kualitas layanan yang diterima.

3.2.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta, menyasar masyarakat pengguna layanan transportasi umum seperti TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan, ekonomi, dan bisnis dengan mobilitas penduduk yang sangat tinggi. Pemerintah daerah pun terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem transportasi publik melalui berbagai kebijakan dan alokasi anggaran, sehingga wilayah ini dinilai relevan untuk mengkaji pengaruh efektivitas pemanfaatan anggaran dan akuntabilitas publik terhadap kepuasan masyarakat pengguna transportasi umum.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh masyarakat pengguna layanan transportasi umum di Provinsi DKI Jakarta, termasuk pengguna TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta. Karena jumlah keseluruhan penggunaanya tidak dapat dipastikan secara pasti dan terus berubah, penelitian ini memperlakukan populasi sebagai populasi yang tidak diketahui (unknown population). Oleh sebab itu, responden ditentukan melalui teknik pengambilan sampel yang disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan penelitian agar data yang diperoleh mampu merepresentasikan populasi yang diteliti.

3.3.2 Sampel

Sampel penelitian adalah sebagian anggota populasi pengguna transportasi publik di Provinsi DKI Jakarta yang memenuhi kriteria yang ditetapkan peneliti. Pemilihan sampel ini bertujuan memperoleh data representatif untuk menganalisis persepsi masyarakat mengenai efektivitas pemanfaatan anggaran, akuntabilitas publik, serta kepuasan terhadap layanan transportasi umum. Di samping data terkait variabel penelitian, peneliti juga mengumpulkan informasi karakteristik responden sebagai data pendukung, meliputi usia, jenis kelamin, dan status pekerjaan. Rentang usia responden dikelompokkan menjadi kurang dari 15 tahun, 15-20 tahun, 21-25 tahun, 26-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, dan lebih dari 50 tahun; jenis kelamin dibagi menjadi laki-laki dan perempuan; sedangkan status pekerjaan dikategorikan sebagai pelajar/mahasiswa, pegawai, wirausaha, atau pekerjaan lainnya. Informasi karakteristik ini digunakan untuk menggambarkan profil umum sampel yang menjadi sumber data penelitian.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.

3.5 Penentuan Jumlah Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini memakai teknik purposive sampling, yakni pemilihan responden berdasarkan pertimbangan dan karakteristik tertentu sesuai kebutuhan penelitian. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel nonprobabilitas yang memilih responden berdasarkan kriteria tertentu agar data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini, responden harus memenuhi beberapa persyaratan: berusia minimal 15 tahun, berdomisili atau beraktivitas di wilayah DKI Jakarta, pernah menggunakan layanan transportasi umum di DKI Jakarta, serta memiliki pengetahuan atau mengikuti perkembangan transportasi umum di wilayah tersebut. Kriteria ini ditetapkan supaya responden memiliki pengalaman dan pemahaman yang cukup mengenai layanan transportasi publik, sehingga penilaian yang diberikan terkait efektivitas pemanfaatan anggaran, akuntabilitas publik, dan kepuasan masyarakat dapat bersifat objektif.

3.6 Instrumen Penelitian

Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian. Instrumen disusun berdasarkan indikator masing-masing variabel sehingga setiap pernyataan mampu menggambarkan konsep yang hendak diukur. Penilaian tiap butir pernyataan menggunakan Skala Likert dengan lima alternatif jawaban: skor 1 untuk Sangat Tidak Setuju, skor 2 untuk Tidak Setuju, skor 3 untuk Netral, skor 4 untuk Setuju, dan skor 5 untuk Sangat Setuju. Skala ini dipakai untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap setiap pernyataan, sehingga persepsi, sikap, dan penilaian yang diberikan dapat dikonversi menjadi data kuantitatif, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menjawab tujuan penelitian serta menguji hubungan antarvariabel yang diteliti.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Uji Validitas

Gambar 1. Hasil Uji Validitas X1

Correlations

		Correlations					
		Item X1.1	Item X1.2	Item X1.3	Item X1.4	Item X1.5	VARIABEL X1
Item X1.1	Pearson Correlation	1	,779**	,794**	,799**	,723**	,909**
	Sig. (2-tailed)		<,001	<,001	<,001	<,001	<,001
	N	100	100	100	100	100	100
Item X1.2	Pearson Correlation	,779**	1	,752**	,746**	,763**	,896**
	Sig. (2-tailed)	<,001		<,001	<,001	<,001	<,001
	N	100	100	100	100	100	100
Item X1.3	Pearson Correlation	,794**	,752**	1	,839**	,740**	,910**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001		<,001	<,001	<,001
	N	100	100	100	100	100	100
Item X1.4	Pearson Correlation	,799**	,746**	,839**	1	,804**	,920**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001		<,001	<,001
	N	100	100	100	100	100	100
Item X1.5	Pearson Correlation	,723**	,763**	,740**	,804**	1	,889**
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001		<,001
	N	100	100	100	100	100	100
VARIABEL X1	Pearson Correlation	,909**	,896**	,910**	,920**	,889**	1
	Sig. (2-tailed)	<,001	<,001	<,001	<,001	<,001	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pengujian validitas atas variabel Efektivitas Pemanfaatan Anggaran (X1) memperlihatkan bahwa keseluruhan indikatornya layak dipakai sebagai alat ukur penelitian. Angka koefisien korelasi (r hitung) pada tiap butir pernyataan tercatat berada di kisaran 0,889 sampai 0,920, yaitu di atas nilai r tabel 0,1966 untuk 100 responden pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Nilai p -value yang dihasilkan juga sebesar 0,000 untuk setiap indikator, berada di bawah ambang 0,05. Atas dasar itu, seluruh butir pernyataan pada variabel X1 dapat dikatakan mengukur konstruk penelitian secara akurat dan layak dipakai dalam proses pengambilan data.

Gambar 2. Hasil Uji Validitas X2

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

VARIABEL X3	N	100	100	100	100	100	100
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	Pearson Correlation	.188**	.183**	.801**	.188**	.008**	.1
Item X3.2	N	100	100	100	100	100	100
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001
	Pearson Correlation	.103**	.313**	.180**	.383**	.1	.008**
Item X3.4	N	100	100	100	100	100	100
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001
	Pearson Correlation	.181**	.208**	.024**	.1	.383**	.188**
Item X3.3	N	100	100	100	100	100	100
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001
	Pearson Correlation	.008**	.028**	.1	.024**	.180**	.801**
Item X3.5	N	100	100	100	100	100	100
	Sig. (2-tailed)	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001
	Pearson Correlation	.210**	.1	.028**	.208**	.313**	.183**
Item X3.1	N	100	100	100	100	100	100
	Sig. (2-tailed)		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	Pearson Correlation	.1	.210**	.008**	.181**	.103**	.188**
		Item X3.1	Item X3.2	Item X3.3	Item X3.4	Item X3.5	VARIABEL X3

Correlations

Pada variabel Akuntabilitas Publik (X2), hasil uji validitas juga menegaskan bahwa semua indikatornya telah memenuhi kriteria kelayakan. Rentang nilai r hitung untuk tiap pernyataan berada antara 0,669 hingga 0,867, seluruhnya melampaui r tabel sebesar 0,1966, dengan nilai signifikansi 0,000 pada masing-masing indikator, di bawah taraf 0,05. Dengan begitu, tiap butir pernyataan pada X2 terbukti cukup representatif sehingga instrumen ini dapat dinyatakan valid untuk digunakan dalam pengumpulan data.

Gambar 3. Hasil Uji Validitas Y

Correlations

		Item Y1	Item Y2	Item Y3	Item Y4	Item Y5	VARIABEL Y
Item Y1	Pearson Correlation	1	.871**	.780**	.662**	.335**	.846**
	Sig. (2-tailed)		<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100
Item Y2	Pearson Correlation	.871**	1	.813**	.722**	.325**	.868**
	Sig. (2-tailed)	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100
Item Y3	Pearson Correlation	.780**	.813**	1	.811**	.389**	.896**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100
Item Y4	Pearson Correlation	.662**	.722**	.811**	1	.363**	.847**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001		<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100
Item Y5	Pearson Correlation	.335**	.325**	.389**	.363**	1	.662**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001
	N	100	100	100	100	100	100
VARIABEL Y	Pearson Correlation	.846**	.868**	.896**	.847**	.662**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Hal serupa berlaku pula untuk variabel Kepuasan Masyarakat (Y), yang seluruh indikatornya juga dinyatakan valid sebagai instrumen penelitian. Nilai koefisien korelasi (r hitung) pada tiap pernyataan berada di rentang 0,662 sampai 0,896, seluruhnya di atas r tabel 0,1966, sehingga tingkat validitasnya tergolong memadai. Nilai signifikansi sebesar 0,000 pada setiap item, yang lebih kecil dari taraf 0,05, turut memperkuat kesimpulan bahwa tiap

pernyataan pada variabel Y mampu mengukur konstruk penelitian secara tepat dan layak dipakai sebagai instrumen pengumpulan data.

4.1.2 Uji Reliabilitas

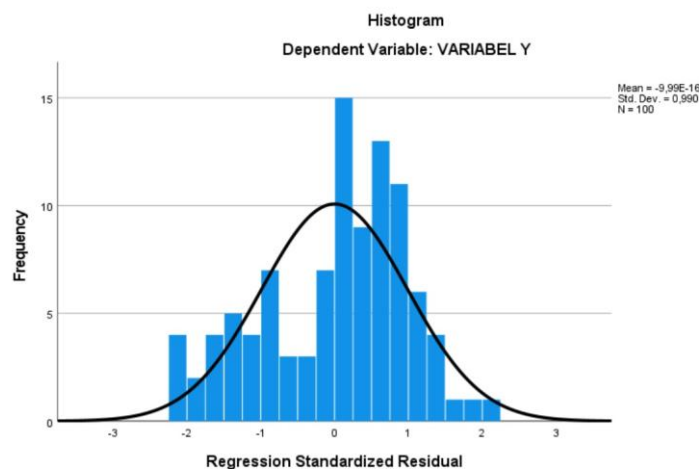
Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas

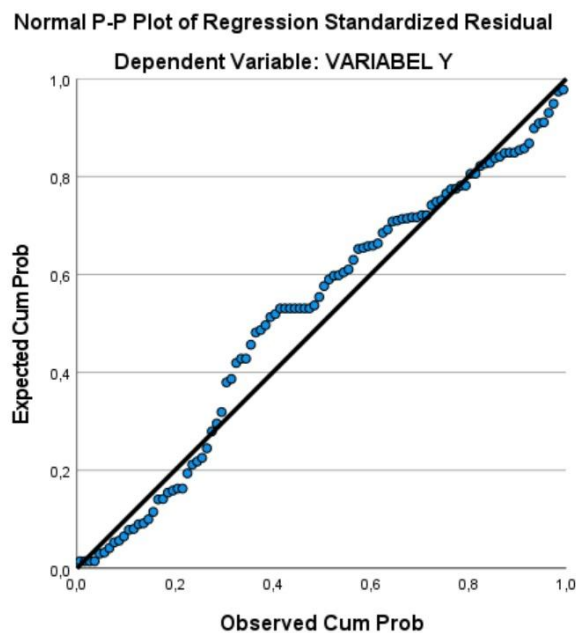
No	Variabel	Cronbach alpha	Batas Bawah Alpha	Keterangan
1	<i>Efektivitas Pemanfaatan Anggaran (X1)</i>	0,826	0,60	Reliabel
2	Akuntabilitas Publik (X2)	0,801	0,60	Reliabel
3	Kepuasan Masyarakat (Y)	0,804	0,60	Reliabel

Uji reliabilitas memperlihatkan bahwa seluruh instrumen penelitian memiliki konsistensi internal yang baik. Nilai Cronbach's Alpha masing-masing tercatat 0,826 untuk Efektivitas Pemanfaatan Anggaran (X1), 0,801 untuk Akuntabilitas Publik (X2), dan 0,804 untuk Kepuasan Masyarakat (Y) – ketiganya melampaui ambang minimum 0,60. Ini menandakan setiap indikator pada masing-masing variabel cukup andal, sehingga instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel dan layak dipakai sebagai dasar analisis pada tahap berikutnya.

4.1.3 Uji Normalitas Grafik

Gambar 4. Hasil Uji Normalitas





Uji normalitas dilakukan dengan mencermati grafik histogram residual serta Normal Probability-Probability (P-P) Plot. Bentuk histogram yang dihasilkan mendekati kurva normal tanpa penyimpangan distribusi yang berarti, dan hal ini diperkuat oleh sebaran titik pada grafik P-P Plot yang mengikuti garis diagonal. Kedua indikasi tersebut menunjukkan bahwa residual model regresi telah berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas sebagai salah satu syarat analisis regresi terpenuhi dan model layak dilanjutkan ke tahap pengujian berikutnya.

4.1.4 Uji Multikolinearitas

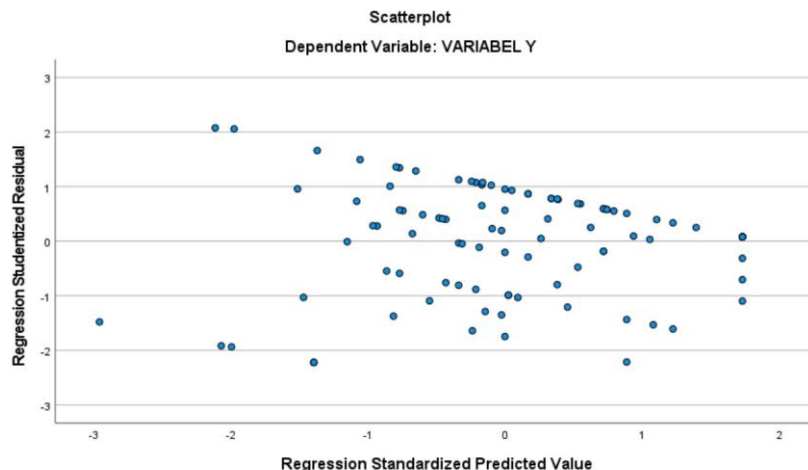
Gambar 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a											
Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Zero-order			Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	14,561	1,640		8,877	<,001					
	VARIABEL X1	,188	,067	,278	2,794	,006	,387	,273	,253	,825	1,212
	VARIABEL X2	,221	,085	,259	2,602	,011	,376	,255	,236	,825	1,212
a. Dependent Variable: VARIABEL Y											

Uji multikolinearitas mencatat nilai Tolerance sebesar 0,825 dan Variance Inflation Factor (VIF) sebesar 1,212 untuk variabel Efektivitas Pemanfaatan Anggaran (X1) dan Akuntabilitas Publik (X2). Angka Tolerance yang berada di atas 0,10 menandakan korelasi antarvariabel independen tergolong rendah, sementara VIF yang jauh di bawah ambang 10 mengindikasikan tidak ada duplikasi informasi antarvariabel bebas. Dari kedua indikator ini, model penelitian dapat disimpulkan bebas dari gejala multikolinearitas sehingga seluruh variabel independen memenuhi asumsi klasik ini dan siap dipakai pada tahap analisis regresi selanjutnya.

4.1.5 Uji Heterokedastisitas

Gambar 6. Hasil Uji Heterokedastisitas



Uji heteroskedastisitas mencermati pola sebaran titik pada scatterplot antara Studentized Residual dan Standardized Predicted Value. Titik-titik residual tampak menyebar acak di sekitar sumbu Y — baik di atas maupun di bawah nol — tanpa membentuk pola gelombang, penyempitan, ataupun pelebaran tertentu. Sebaran acak semacam ini mengindikasikan varians residual yang relatif konstan pada setiap nilai prediksi, sehingga model regresi dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas. Dengan terpenuhinya asumsi homoskedastisitas ini, model layak dilanjutkan ke tahap analisis regresi berikutnya.

4.1.6 Uji Autokorelasi

Gambar 7. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,453 ^a	,205	,189	2,606	1,707

a. Predictors: (Constant), VARIABEL X2, VARIABEL X1
b. Dependent Variable: VARIABEL Y

Nilai Durbin-Watson (DW) yang diperoleh dari uji autokorelasi tercatat sebesar 1,707, berada dalam rentang 1,5-2,5 yang mengindikasikan tidak adanya korelasi antarresidual dalam model regresi. Artinya, setiap residual bersifat independen dan tidak terpengaruh oleh residual pada pengamatan lain. Terpenuhinya asumsi autokorelasi ini menjadikan model regresi cukup andal untuk dipakai sebagai dasar pengujian hipotesis dan analisis statistik lanjutan.

4.1.7 Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Gambar 8. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14,561	1,640		8,877	<,001
	VARIABEL X1	,188	,067	,278	2,794	,006
	VARIABEL X2	,221	,085	,259	2,602	,011

a. Dependent Variable: VARIABEL Y

Analisis regresi linear berganda menghasilkan persamaan $Y = 14,561 + 0,188X_1 + 0,221X_2$. Konstanta sebesar 14,561 mencerminkan proyeksi Kepuasan Masyarakat (Y) apabila kedua variabel bebas, Efektivitas Pemanfaatan Anggaran (X_1) dan Akuntabilitas Publik (X_2), berada dalam kondisi tetap. Koefisien X_1 sebesar 0,188 berarti kenaikan satu satuan pada variabel tersebut diproyeksikan mendorong Kepuasan Masyarakat naik 0,188 satuan, dengan variabel lain diasumsikan konstan. Adapun koefisien X_2 sebesar 0,221 menunjukkan bahwa kenaikan satu satuan pada Akuntabilitas Publik diperkirakan meningkatkan Kepuasan Masyarakat sebesar 0,221 satuan. Karena kedua koefisien bernilai positif, hubungan antara kedua variabel bebas dengan Kepuasan Masyarakat bersifat searah – semakin baik efektivitas anggaran maupun akuntabilitas publik, semakin tinggi pula kepuasan masyarakat.

4.1.8 Uji t(Uji Parsial)

Gambar 9. Hasil Uji T(Uji Parsial)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14,561	1,640		8,877	<,001
	VARIABEL X1	,188	,067	,278	2,794	,006
	VARIABEL X2	,221	,085	,259	2,602	,011

a. Dependent Variable: VARIABEL Y

Uji parsial (uji t) untuk variabel Efektivitas Pemanfaatan Anggaran (X_1) menghasilkan t hitung 2,794 dengan signifikansi 0,006 – berada di bawah taraf 0,05 – sehingga X_1 terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Masyarakat (Y), dan hipotesis terkait pengaruh X_1 terhadap Y dapat diterima.

Adapun variabel Akuntabilitas Publik (X_2) memperoleh t hitung 2,602 dengan signifikansi 0,011, juga di bawah 0,05, sehingga X_2 pun terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Dengan demikian, kedua variabel independen sama-sama memberi kontribusi nyata secara parsial terhadap variabel dependen, dan kedua hipotesis penelitian diterima.

4.1.9 Uji F (Uji Parsial)

Gambar 10. Hasil Uji F (Uji Parsial)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	170,032	2	85,016	12,516	<,001 ^b
	Residual	658,878	97	6,793		
	Total	828,910	99			

a. Dependent Variable: VARIABEL Y

b. Predictors: (Constant), VARIABEL X2, VARIABEL X1

Uji simultan (uji F) menghasilkan F hitung sebesar 12,516 dengan signifikansi 0,000, berada di bawah taraf 0,05 sekaligus melampaui F tabel 3,09. Hasil ini menolak hipotesis nol (H_0) dan menerima hipotesis alternatif (H_a), yang berarti Efektivitas Pemanfaatan Anggaran (X_1) dan Akuntabilitas Publik (X_2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Masyarakat (Y). Dengan kata lain, model regresi yang dibangun cukup baik dalam menggambarkan hubungan antara variabel independen dan dependen, sehingga layak dijadikan dasar pengujian hipotesis dan penarikan kesimpulan penelitian.

4.1.10 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Gambar 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,453 ^a	,205	,189	2,606	,205	12,516	2	97	<,001

a. Predictors: (Constant), VARIABEL X2, VARIABEL X1

Nilai R Square yang diperoleh dari uji koefisien determinasi (R^2) adalah 0,205, atau setara 20,5%. Ini berarti variabel Efektivitas Pemanfaatan Anggaran dan Akuntabilitas Publik bersama-sama menjelaskan 20,5% variasi pada Kepuasan Masyarakat, sedangkan sisanya, 79,5%, dijelaskan oleh faktor-faktor di luar kedua variabel tersebut yang tidak tercakup dalam model regresi ini.

Angka ini menegaskan bahwa kepuasan masyarakat dibentuk oleh banyak aspek, sehingga efektivitas pemanfaatan anggaran dan akuntabilitas publik bukan satu-satunya penentu. Faktor lain yang mungkin turut berperan antara lain kualitas pelayanan, transparansi penyelenggaraan layanan publik, kompetensi aparatur, kelengkapan sarana-prasarana, kemudahan akses, serta kecepatan pelayanan yang belum tercakup dalam penelitian ini. Karena itu, penelitian mendatang disarankan menambahkan variabel-variabel tersebut agar model dapat menjelaskan kepuasan masyarakat secara lebih komprehensif.

4.2 Pembahasan

Sebanyak 100 responden pengguna layanan transportasi umum di DKI Jakarta dilibatkan dalam penelitian ini, dan hasil analisis yang dilakukan menemukan bahwa variabel Efektivitas Pemanfaatan Anggaran dan Akuntabilitas Publik berpengaruh terhadap Kepuasan Masyarakat. Guna menjawab rumusan masalah sekaligus menguji hipotesis, penelitian ini menempuh serangkaian tahapan analisis statistik yang sistematis: uji validitas dan reliabilitas instrumen, uji asumsi klasik sebagai prasyarat regresi, analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi (R^2), uji parsial (uji t), dan uji simultan (uji F). Rangkaian tahapan ini ditempuh agar model penelitian memenuhi kaidah statistik dan menghasilkan analisis yang akurat mengenai hubungan antarvariabel.

4.2.1 Uji Validitas

Hasil uji validitas menegaskan kembali bahwa seluruh indikator variabel Efektivitas Pemanfaatan Anggaran (X1) layak sebagai instrumen penelitian, dengan r hitung berkisar 0,889-0,920 (di atas r tabel 0,1966) dan signifikansi 0,000 pada tiap indikator (di bawah 0,05). Ini menunjukkan setiap pernyataan cukup representatif untuk variabel X1, sehingga instrumennya valid dan layak dipakai dalam pengumpulan data penelitian.

4.2.2 Uji Reliabilitas

Nilai Cronbach's Alpha yang diperoleh adalah 0,826 untuk Efektivitas Pemanfaatan Anggaran, 0,801 untuk Akuntabilitas Publik, dan 0,804 untuk Kepuasan Masyarakat – semuanya di atas batas minimum 0,60, sehingga seluruh instrumen memenuhi syarat reliabilitas.

Ini mengindikasikan bahwa masing-masing variabel memiliki konsistensi internal yang baik dalam mengukur konstruksinya, sehingga instrumen mampu menghasilkan data yang stabil bila digunakan berulang dalam kondisi serupa. Atas dasar itu, seluruh butir pernyataan dinyatakan reliabel dan layak dipakai baik untuk pengumpulan maupun analisis data pada penelitian ini.

4.2.3 Uji Asumsi Klasik

Secara keseluruhan, model regresi pada penelitian ini telah memenuhi seluruh asumsi klasik yang disyaratkan. Dari sisi normalitas, histogram residual yang menyerupai kurva normal serta sebaran titik pada grafik P-P Plot yang mengikuti garis diagonal sama-sama mengindikasikan bahwa residual berdistribusi normal, sehingga model dapat dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya.

Untuk multikolinearitas, nilai Tolerance sebesar 0,825 dan VIF 1,212 pada X1 dan X2 – Tolerance di atas 0,10 dan VIF jauh di bawah 10 – menunjukkan tidak ada hubungan linear kuat antarvariabel independen, sehingga model bebas dari gejala multikolinearitas dan masing-masing variabel bisa dianalisis tanpa masalah korelasi tinggi.

Pada uji heteroskedastisitas, scatterplot memperlihatkan titik residual yang tersebar acak di sekitar sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu, yang berarti varians residual relatif konstan pada setiap nilai prediksi. Model regresi pun dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas dan memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Adapun uji autokorelasi menghasilkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,707, berada dalam rentang 1,5-2,5, yang berarti residual model tidak saling berkorelasi dan asumsi autokorelasi terpenuhi. Dengan seluruh asumsi klasik yang telah terpenuhi tersebut, model regresi ini layak dijadikan dasar pengujian hipotesis dan analisis statistik selanjutnya.

4.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda pada penelitian ini menghasilkan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 14,561 + 0,188X_1 + 0,221X_2 + e$$

Angka konstanta 14,561 menggambarkan nilai dasar Kepuasan Masyarakat (Y) saat kedua variabel bebas, Efektivitas Pemanfaatan Anggaran (X_1) dan Akuntabilitas Publik (X_2), diasumsikan tidak berubah – dengan kata lain, tingkat kepuasan yang diperkirakan tetap muncul terlepas dari pengaruh kedua variabel tersebut.

Koefisien X_1 sebesar 0,188 berarti tiap kenaikan satu satuan pada Efektivitas Pemanfaatan Anggaran diperkirakan menaikkan Kepuasan Masyarakat sebesar 0,188 satuan, dengan variabel lain tetap. Sementara koefisien X_2 sebesar 0,221 menunjukkan bahwa kenaikan satu satuan pada Akuntabilitas Publik diikuti kenaikan Kepuasan Masyarakat sebesar 0,221 satuan, dengan asumsi faktor lain tidak berubah.

Karena kedua koefisien bernilai positif, hubungan keduanya dengan Kepuasan Masyarakat bersifat searah: semakin efektif pemanfaatan anggaran dan semakin baik penerapan akuntabilitas publik, semakin tinggi pula kecenderungan kepuasan masyarakat. Ini menegaskan bahwa kedua variabel tersebut berkontribusi positif terhadap kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diterima.

4.2.5 Pengaruh Efektivitas Pemanfaatan Anggaran terhadap Kepuasan Masyarakat

Uji parsial (uji t) menunjukkan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran memiliki t hitung 2,794 dan signifikansi 0,006, di bawah taraf 0,05, sehingga variabel ini terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Masyarakat. Hipotesis mengenai pengaruh tersebut pun dapat diterima.

Ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran, efisien, dan berorientasi tujuan mampu mendongkrak kualitas pelayanan publik. Pengelolaan anggaran yang baik membuat pelaksanaan program dan penyediaan layanan berjalan lebih efektif, sehingga manfaatnya lebih terasa bagi masyarakat dan pada gilirannya mendorong naiknya tingkat kepuasan terhadap pelayanan instansi pemerintah.

4.2.6 Pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kepuasan Masyarakat

Variabel Akuntabilitas Publik menghasilkan t hitung 2,602 dengan signifikansi 0,011, juga di bawah taraf 0,05, sehingga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Masyarakat. Dengan demikian, hipotesis mengenai pengaruh Akuntabilitas Publik terhadap Kepuasan Masyarakat dinyatakan diterima.

Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan akuntabilitas publik turut mendorong naiknya kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah. Penerapan prinsip akuntabilitas – melalui keterbukaan informasi, kejelasan pertanggungjawaban, transparansi pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan – dapat memupuk kepercayaan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah. Kepercayaan inilah yang mendorong terbentuknya persepsi positif, sehingga tingkat kepuasan terhadap pelayanan publik cenderung meningkat.

4.2.7 Pengaruh Efektivitas Pemanfaatan Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Kepuasan Masyarakat

Uji simultan (uji F) menghasilkan F hitung sebesar 12,516 dengan signifikansi 0,000, di bawah taraf 0,05, dan melampaui F tabel 3,09. Hal ini menunjukkan bahwa Efektivitas Pemanfaatan Anggaran dan Akuntabilitas Publik secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Masyarakat, sehingga hipotesis mengenai pengaruh simultan kedua variabel tersebut dapat diterima.

Temuan ini menegaskan bahwa kepuasan masyarakat bukan hasil satu faktor tunggal, melainkan sinergi antara efektivitas pemanfaatan anggaran dan penerapan akuntabilitas publik. Pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dan efisien, dipadukan dengan transparansi serta pertanggungjawaban yang baik, mampu mengangkat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Pada akhirnya, kondisi ini membentuk persepsi masyarakat yang lebih positif dan mendorong naiknya tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diterima.

4.2.8 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R Square yang diperoleh sebesar 0,205, atau 20,5%, yang berarti Efektivitas Pemanfaatan Anggaran dan Akuntabilitas Publik secara bersama-sama menjelaskan 20,5% variasi Kepuasan Masyarakat, sementara 79,5% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model penelitian ini.

Sementara itu, Adjusted R Square sebesar 0,189 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah sampel dan variabel independen, kemampuan model menjelaskan Kepuasan Masyarakat menjadi 18,9%. Selisih antara R Square dan Adjusted R Square ini mencerminkan penyesuaian terhadap kompleksitas model, sehingga Adjusted R Square memberi gambaran yang lebih representatif tentang kemampuan model tersebut.

Temuan ini menegaskan bahwa Efektivitas Pemanfaatan Anggaran dan Akuntabilitas Publik berkontribusi terhadap Kepuasan Masyarakat, meski pengaruhnya masih tergolong terbatas. Kepuasan masyarakat kemungkinan besar juga dibentuk faktor-faktor lain di luar cakupan penelitian ini, seperti kualitas pelayanan, kompetensi aparatur, kemudahan akses, ketersediaan sarana-prasarana, dan kecepatan pelayanan. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan mempertimbangkan variabel tambahan agar model dapat menjelaskan variasi Kepuasan Masyarakat secara lebih komprehensif.

5. Kesimpulan

Mengacu pada hasil analisis data dan pengujian hipotesis terkait pengaruh Efektivitas Pemanfaatan Anggaran dan Akuntabilitas Publik terhadap Kepuasan Masyarakat, dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut.

1. Efektivitas Pemanfaatan Anggaran terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Masyarakat, dengan t hitung 2,794 dan signifikansi 0,006 (di bawah taraf 0,05). Artinya, semakin efektif pengelolaan dan pemanfaatan anggaran oleh pemerintah, semakin besar peluang meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang mereka terima.
2. Akuntabilitas Publik juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Masyarakat, dengan t hitung 2,602 dan signifikansi 0,011 (di bawah 0,05). Ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas – melalui transparansi, keterbukaan informasi, dan pertanggungjawaban yang baik – dapat memperkuat kepercayaan masyarakat, yang pada akhirnya turut menaikkan kepuasan mereka terhadap pelayanan yang diterima.
3. Secara simultan, Efektivitas Pemanfaatan Anggaran dan Akuntabilitas Publik juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Masyarakat, sebagaimana ditunjukkan oleh uji F dengan F hitung 12,516 (melampaui F tabel 3,09) dan signifikansi 0,000 (di bawah taraf 0,05). Dengan kata lain, kedua variabel independen ini bersama-sama berkontribusi dalam menjelaskan perubahan pada Kepuasan Masyarakat.

Nilai R Square dari uji koefisien determinasi (R^2) tercatat 0,205, atau 20,5%, yang berarti Efektivitas Pemanfaatan Anggaran dan Akuntabilitas Publik menjelaskan 20,5% variasi Kepuasan Masyarakat, sedangkan 79,5% sisanya dipengaruhi faktor lain di luar penelitian ini. Ini

menegaskan bahwa meski kedua variabel berpengaruh signifikan, masih ada berbagai faktor lain yang turut menentukan kepuasan masyarakat.

Secara umum, penelitian ini membuktikan bahwa peningkatan efektivitas pemanfaatan anggaran yang diiringi penerapan akuntabilitas publik secara konsisten memberi kontribusi positif terhadap kepuasan masyarakat. Karena itu, pemerintah diharapkan terus mengoptimalkan pengelolaan anggaran secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, sembari memperkuat transparansi dan pertanggungjawaban dalam penerapan prinsip akuntabilitas. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu mendorong kualitas pelayanan publik yang lebih baik, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, serta meningkatkan kepuasan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Auditya, L., Husaini, & Lismawati. (2021). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Fairness*.
- [2] Degodona, P., Gulo, B. J., & Simanjorang, L. K. (2023). Suatu Kajian tentang Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*.
- [3] Fajrianto. (2022). Implementasi Peran E-Government dalam Mendukung Keterbukaan Informasi Pengelolaan Anggaran Daerah pada Website Resmi Pemerintah Kabupaten Banggai. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3(3), 133-140.
- [4] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- [5] Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi.%2F1%2F13_Modul Onlilne ke-13%3B Profesionalisme%2C Kreatifitas dan Inovasi.pdf
- [6] Nurrizkiana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap Kepercayaan Public-Stakeholders. *Journal of Accounting and Investment*, 18(1).
- [7] Wibowo, A. T., & Susliyanti, E. D. (2024). Pengaruh Transparansi Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan terhadap Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 4(2).
- [8] Wirawan, & Yaya, R. (2024). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Keadilan terhadap Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Desa: Apakah Kepuasan Masyarakat Memediasi? *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*.
- [9] Wulandari, E., & Artha, I. G. (2016). Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagai Bentuk Transparansi Pemerintah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*.
- [10] Zainab, M., & Mulyadi, D. Z. (2024). Transparansi Keuangan Daerah: Studi Kualitatif tentang Pengelolaan Anggaran di Sulawesi Tenggara. *Indonesian Journal of Management and Accounting*.